

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Agensi

Pihak pemegang saham menginginkan pengembalian yang tinggi atas investasi yang telah dikeluarkan untuk perusahaan, sedangkan manajemen perusahaan memiliki kepentingan tersendiri yaitu untuk mendapatkan kompensasi yang lebih besar atas hasil kerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsipal dan agen mempunyai kepentingan yang saling bersaing. Oleh karena itu, terdapat konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Manajemen pada akhirnya harus melakukan manipulasi laporan keuangan untuk memenuhi tuntutan prinsipal dalam memenuhi target keuntungan dan kompensasi perusahaan.¹

Teori agensi berhubungan dengan apa yang disebut masalah keagenan, yaitu masalah yang terkait dengan pemisahan antara kepemilikan dan manajemen, dan itu telah mewakili perspektif teoritis dominan yang diterapkan pada studi tentang tata kelola perusahaan. Teori keagenan juga telah digunakan di banyak sektor lain, terutama di sektor publik dan hubungan internal dan eksternal, seperti dalam proses *outsourcing* dan kemitraan publik-swasta.²

Teori keagenan mengasumsikan bahwa seluruh pihak berperan untuk kepentingannya sendiri. Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Jensen dan Meckling (1976). Hubungan keagenan terjadi dikarenakan adanya kesepakatan antara pemilik (*principal*) atau pemilik saham dan manajemen perusahaan (*agent*) yang mengelola perusahaan. Pemegang saham menyerahkan wewenang kepada manajemen untuk menjalankan perusahaan termasuk untuk mengambil keputusan.³ Teori keagenan ini merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen

¹ Farhan Harik Ramadhan, 'Pengaruh Faktor Tekanan Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2018-2020 Farhan', *Jurnal Manajemen & Akuntansi Prabumulih*, 6.1 (2022), 19–28.

² Yolinda Yanti Sonbay, 'Kritik Terhadap Pemberlakuan Teori Agensi Dalam', 158, 2021 <<https://doi.org/10.24034/J25485024.Y2022.V6.I2.5176>>.

³ Natasha Suri, Manajemen Laba, 'Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi Volume X No. 2 / November / 2018', X.2 (2018), 65–85.

perusahaan. Dalam teori ini memperlihatkan bahwa adanya pendelegasian dari prinsipal (*stakeholder*) kepada manajer perusahaan untuk menjalankan sebuah perusahaan.⁴

Teori agensi menjelaskan bahwa dalam suatu perusahaan muncul suatu kontrak antara pemilik modal (*principle*) dan pengelola modal (*agent*). Kedua belah pihak akan memiliki fokus tersendiri. Pemilik modal akan fokus pada keinginannya dalam *going concern* perusahaan sedangkan *agent* berfokus pada kesejahteraannya dalam pengelolaan perusahaan. Untuk mencapai keinginannya, pihak *agent* bisa saja melakukan hal yang merugikan perusahaannya seperti melakukan salah saji maupun kecurangan. Perbedaan kepentingan ini membuat adanya suatu konflik antara *principle* dan *agent* yang harus dijumpai oleh kehadiran pihak ketiga yang bersifat independen agar laporan keuangan yang dibuat oleh pihak *agent* dapat dipercaya oleh *principle* maupun *stakeholder* yang lainnya. Dalam menjalankan perikatan audit atas laporan keuangan, auditor bertanggungjawab dalam pemberian opini audit yang sesuai dengan kenyataannya. Selain dari pemberian audit atas laporan keuangan tahun buku yang mereka audit, auditor juga berkewajiban untuk menilai perkembangan perusahaan. Hal ini karena banyak pihak yang berkepentingan dengan kondisi perusahaan untuk masa depan, contohnya saja adalah pihak bank dalam pemberian kredit untuk jangka panjang.⁵

Para manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham untuk membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*). Jadi, teori ini timbul pada saat keinginan dan tujuan dari principal dan *agent* berlawanan, dan melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh *agent* adalah hal yang sulit bagi *principal*.⁶

⁴ Aulia Fatiha Kurniadi And Dwi Urip Wardoyo, 'Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Dalam Perspektif Teori Agensi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2020)', 1.2 (2022), 141–50.

⁵ I Dewa Made Endiana, Universitas Mahasaraswati Denpasar, 'Opini Going Concern: Ditinjau Dari Agensi Teori Dan Pemicunya I Dewa Made Endiana Ni Nyoman Ayu Suryandari', 32, 2017, 224–42 <<https://doi.org/10.24034/J25485024.Y2021.V5.I2.4490.P-Issn>>.

⁶ Selvy Yulita Abdillah And R Anastasia Endang Susilawati, 'Pengaruh Good Corporate Governance Pada Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2014)', *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (Jrma)*, 2014, 1–14.

Untuk menghindari adanya dampak negatif dari penerapan *agency theory* adalah melakukan pengawasan terhadap keuangan yang digunakan oleh manajemen. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan kepada pihak manajemen bahwa dana yang ada digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu juga harus memastikan bahwa manajemen melakukan berbagai mekanisme terbaik untuk kepentingan perusahaan semata.⁷

2. *Good Corporate Governance*

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) adalah konsep yang sudah saatnya diimplementasikan pada berbagai perusahaan yang terdapat di Indonesia, karena melalui konsep yang menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari unsur-unsur RUPS, direksi dan komisaris dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang harmonis, baik secara intern maupun ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan shareholders dan stakeholders. *Good Corporate Governance* digunakan untuk memajukan terwujudnya pasar yang efisien, transparan dan terus menerus dengan kebijakan perundang-undangan. Praktek *Good Corporate Governance* butuh diperkuat oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yakni negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia bisnis sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pemakai produk maupun jasa didunia bisnis.⁸

Good Corporate Governance merupakan bentuk serta prosedur yang mengatur manajemen perusahaan supaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta etika usaha yang berlaku. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, pemangku kepentingan dan investor dapat memperoleh manfaat dari peningkatan kinerja industri dan nilai ekonomi jangka panjang. Dewan direksi, manajemen, dan pemegang saham merupakan pemeran utama dalam tata kelola industri. Karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lainnya, masyarakat,

⁷ Maria Istikhomah, 'Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7.7 (2014).

⁸ Tri Kartika Pertiwi, 'Pengaruh Kinerja Keuangan , Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Food And Beverage', *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2012.

regulator, dan lingkungan adalah contoh pemangku kepentingan tambahan.⁹

Good Corporate Governance dapat dimaknai sebagai suatu mekanisme dan bentuk yang diperlukan oleh organ perusahaan (pemilik modal/pemegang saham, dewan pengawas/komisaris dan direksi) guna menambah kesuksesan bisnis dan tanggung jawab industri untuk menciptakan nilai pemilik modal dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya serta beracuan pada kebijakan undang-undang dan berbagai nilai etika.¹⁰

Good Corporate Governance secara pokok adalah suatu sistem (*input, Proses, Output*) dan seperangkat peraturan yang mengelola hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) utamanya pada makna sempit keterkaitan antara investor, dewan komisaris, dan dewan direksi untuk terwujudnya tujuan industri.¹¹ *Good Corporate Governance* merupakan sebuah aturan yang mengelola hubungan diantara berbagai pihak yang berkepentingan terkait atas hak dan kewajibannya, serta system yang mengendalikan dan mengarahkan perusahaan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia*.¹²

Tata kelola industri yang baik, yang dalam terminologi modern diistilahkan sebagai *Good Corporate Governance* berhubungan dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang maknanya “Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik”.¹³

1) Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Secara global prinsip dasar *good corporate governance* terdiri dari lima, yaitu:

⁹ Muhammad Fathorossil, Dwi Cahyono², ‘Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba’, *Journal Of Business, Management And Accounting*, 2 (2020), 208–19.

¹⁰ Evan Hamzah Muchtar, “Corporate Governance: Konsep Dan Implementasinya Pada Emiten Saham Syariah”, (2021). Hlm. 37.

¹¹ Inka Novitasari, ‘Pengaruh Praktik Good Corporate Governance Terhadap Praktik Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)’, *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 13.2 (2018), 75–92.

¹² Hadi Sucipto And Others, ‘Pengaruh Good Corporate Governance , Financial Distress Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba’, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 4.1 (2021), 13–24.

¹³ M Shidqon Prabowo, ‘Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Prespektif Islam’, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie Vol.*, 11.2 (2018), 257–70.

- a. *Transparency* (keterbukaan informasi), adalah keterbukaan dalam melakukan cara penentuan kebijakan dan keterbukaan untuk menyampaikan keterangan materiil dan sesuai mengenai industri. Dalam kaitannya dengan Islam, konsep transparansi (keterbukaan informasi) dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بَدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلَْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar). Dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya.....” (Q.S. Al-Baqarah:282)

- b. *Accountability* (akuntabilitas), adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan akuntabilitas bagian industri yang hasilnya manajemen industri terimplementasikan secara tepat.
- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban), ialah konsistensi (kepatuhan) di dalam mengelola industri terhadap prinsip korporasi yang sehat dan kebijakan perundangan yang berlaku. Dalam Islam, prinsip ini dianggap sebagai perbuatan baik, sehingga setiap orang pada industri hendaknya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam pekerjaannya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfaal ayat 27 berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَخُوْنُوْا اَمَنَتِكُمْ
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S. Al Anfaal:27).¹⁴

- d. *Independency* (kemandirian), yaitu sebuah kondisi dimana industri di kelola secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan serta tekanan/pengaruh dari pihak manajemen yang tidak relevan dengan kebijakan dan perundang-undangan yang berlaku serta beragam prinsip korporasi yang baik.
- e. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yakni perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi beragam hak stakeholder yang timbul sesuai kesepakatan dan kebijakan undang-undang yang berlaku.¹⁵ Dalam Al-Qur’an, prinsip fairness ini dijelaskan dalam surat An-Nisaa ayat 58 :

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا

الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَارِعُوا إِلَى الْبَابِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. AnNisaa:58)¹⁶

2) Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan praktek *Good Corporate Governance* yaitu guna menambah kinerja organisasi dan mencegah atau mengurangi peluang praktik kecurangan dan kesalahan signifikan dalam mengelola aktivitas organisasi.¹⁷ *Good corporate governance* memiliki 5 tujuan utama yaitu:

- a. Menjaga hak dan kepentingan pemilik modal.

¹⁴ Muhammad Sul-ton Arif And Others, ‘Jurnal Ekonomi , Manajemen , Bisnis Dan Sosial Good Governance Dalam Sudut Pandang Islam (Penjelasan Al- Qur ’ An)’, 2 (2022), 207–18.

¹⁵ Thomas S Kaihatu And Others, ‘Good Corporate Governance Dan Penerapannya Di Indonesia’, 1–9.

¹⁶ Muhammad Sul-ton Arif And Others, ‘Jurnal Ekonomi , Manajemen , Bisnis Dan Sosial Good Governance Dalam Sudut Pandang Islam (Penjelasan Al- Qur ’ An)’, 2 (2022), 207–18.

¹⁷ Titik Mildawati Kholidah, Nur, ‘Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pegawai’, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.3 (2017).

- b. Menjaga hak dan kepentingan *stakeholders* lainnya.
- c. Meningkatkan nilai saham dan perusahaan.
- d. Meningkatkan kinerja Dewan Komisaris dan Manajemen.
- e. Meningkatkan hubungan Dewan Komisaris dan Manajemen.¹⁸

Tujuan dari *Good Corporate Governance* ialah memberikan nilai tambah untuk seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan, khususnya pemilik modal dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu nilai tambah yang dapat diperoleh oleh perusahaan adalah dengan adanya mekanisme pengawasan terhadap aktivitas operasional perusahaan. Pengawasan ketat terhadap perusahaan akan berdampak pada keinginan manajemen untuk bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham.¹⁹

Good Corporate Governance berperan penting dalam menambah nilai perusahaan secara berkelanjutan dan bisa memberikan manfaat bagi kepentingan para pemegang saham dan *stakeholders* yang terkait.²⁰ Penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan memiliki beberapa manfaat, antara lain yaitu:

1. Meningkatkan kinerja bisnis dengan menemukan cara yang lebih efektif dalam mengambil keputusan kebijakan, meningkatkan efisiensi operasional industri, dan memberikan layanan kepada pemangku kepentingan.
2. Mempermudah penerimaan dana pembiayaan yang lebih hemat (karena faktor kepercayaan), yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.
3. Meningkatkan kepastian investor dalam hal alokasi modal.
4. Kinerja industri akan memuaskan investor karena akan menambah nilai pemegang saham dan meningkatkan

¹⁸ Rinitami Njatrijani And Others, 'Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan Jurnal Gema Keadilan', *Jurnal Gema Keadilan*, 6.November (2019).

¹⁹ Welly Salipadang Robert Jao Beauty, 'Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Return Saham', *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 6.1 (2017), 83–101.

²⁰ Kirmizi & Restu Agusti Nurmaria Rahmatika, 'Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Pada Pt Angkasa Pura Ii) Nurmaria', *Jurnal Akuntansi*, 3.2 (2015), 148–59.

pendapatan APBN, khususnya dari hasil privatisasi, dan dividen khusus untuk BUMN.²¹

Dapat dikatakan bahwa mengikuti tata kelola perusahaan yang baik memiliki beberapa keuntungan dan manfaat, seperti:

1. Industri dapat memangkas biaya keagenan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Ini adalah biaya yang timbul ketika wewenang didelegasikan kepada manajemen, seperti ketika manajemen menggunakan sumber daya industri untuk keuntungan pribadi atau ketika menganalisis tindakannya sendiri.
2. Dunia usaha dapat menurunkan biaya modal, atau biaya modal yang harus dikeluarkan jika sektor tersebut meminta pinjaman dari pemberi pinjaman. Hal ini merupakan hasil dari pengelolaan usaha yang baik dan juga memberikan acuan yang baik kepada kreditur.
3. *Good corporate governance* akan memungkinkan dicegahnya atau setidaknya dapat dibatasi perilaku penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak direksi dalam mengelola industri. Hal ini pastinya dapat menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut.
4. Ketika investor menjadi lebih percaya diri terhadap pengelolaan industri tempat mereka berinvestasi, nilai yang dirasakan perusahaan mungkin meningkat. Mendapatkan lebih banyak kepercayaan investor terhadap dunia usaha akan memfasilitasi kemampuan mereka untuk memperoleh pendanaan tambahan untuk berbagai kebutuhan, terutama ekspansi.
5. Pemilik modal secara otomatis akan melihat peningkatan nilai sahamnya dan dividen yang diterimanya jika mereka meningkatkan kinerja seperti yang ditunjukkan pada poin 1. Selain itu, hal ini akan mengakibatkan peningkatan jumlah pajak yang dibayarkan oleh dunia usaha, sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan. penerimaan negara dari industri pajak. Apalagi bila perusahaan yang bersangkutan berbentuk perusahaan BUMN, maka

²¹ Umi Murtini And Others, 'Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Di Indonesia', *Jrak*, 8.1 (2012), 69.

- peningkatan kinerja tadi juga akan dapat meningkatkan penerimaan negara dari pembagian laba BUMN.
6. Motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diharapkan meningkat hasil dari praktik tata kelola perusahaan yang baik yang memandang karyawan sebagai pemangku kepentingan yang harus dikelola secara efektif oleh bisnis. Fase kemajuan yang akan datang ini tentunya juga akan mampu menambah kepuasan dan produktivitas karyawan.
 7. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap bisnis akan meningkat dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara efektif, sehingga meningkatkan reputasi perusahaan.
 8. Kualitas laporan keuangan perusahaan juga akan meningkat seiring dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten. Karena kewajiban mereka untuk mengkomunikasikan informasi secara transparan (terbuka) dan sesuai dengan semua aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku, manajemen biasanya menahan diri untuk tidak memanipulasi laporan keuangan.²²
- 3) Mekanisme *Good Corporate Governance*

Pengelolaan perusahaan (*good corporate governance*) itu sendiri bisa diartikan secara luas pada literatur yang ada dan terbatas. Secara terbatas, istilah tersebut berkaitan dengan hubungan antara manajer, direktur, auditor dan pemegang saham, sedangkan secara luas istilah pengelolaan perusahaan dapat meliputi kombinasi hukum, peraturan, aturan pendaftaran dan praktik pribadi yang meningkatkan perusahaan menarik modal masuk, memiliki kinerja yang bagus, menghasilkan keuntungan, serta memenuhi harapan masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban hukum. Keberadaan organ tambahan tersebut memiliki tanggung jawab yang berhubungan dengan pelaksanaan *good corporate governance*, yaitu:²³

a. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial mengacu pada saham industri yang dimiliki oleh manajemen, atau dapat dikatakan

²² Jojok Dwiridotjahjono, 'Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia', *Jurnal Administrasi Bisnis Unpar*, 5.2 (2009), 101–12.

²³ Rahma Febrina , Ulfi Maryati, Ferdawati, "Pengaruh Praktik Good Corporate Governance Terhadap Praktik Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017)", *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, Vol. 13, No. 2 (2018). Hlm. 78.

manajemen juga berperan sebagai pemilik modal perusahaan. Bisa juga merujuk pada kepemilikan saham industri yang dimiliki dewan komisaris dengan persentase tertentu. Salah satu strategi tata kelola perusahaan yang efektif untuk mengurangi biaya keagenan adalah dengan manajemen memiliki persentase saham perusahaan yang lebih besar. Jika manajemen memiliki saham perusahaan, hal ini akan memberikan insentif kepada mereka untuk memaksimalkan kinerja guna meminimalkan tindakan manajemen laba. Selain itu, pemilik modal akan merasa lebih percaya diri karena kepentingannya selaras dengan kepentingan saham manajerial.²⁴

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajer mempunyai saham perusahaan atau dengan istilah lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemilik modal.²⁵ Kepemilikan manajerial yaitu persentase kepemilikan saham pada perusahaan oleh pihak manajerial. Manajer yang sekaligus pemilik modal akan berusaha bekerja secara maksimal dan tidak hanya mengutamakan kepentingannya sendiri. Manajemen selalu berusaha menaikkan kinerja serta nilai industri sebab dengan menaikkan kinerja serta nilai industri maka kekayaannya yang dimiliki sebagai pemilik modal akan bertambah, sehingga kemakmuran pemilik modal akan bertambah pula.²⁶

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen, dengan tingginya tingkat kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya untuk mendapatkan laba bukan dengan melakukan praktik manajemen laba karena sebagai pemegang saham manajemen pun menginginkan laba yang nyata atas kinerja

²⁴ Novy Sulistyoningih and Nur Fadrih Asyik, 'Pengaruh Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Manajemen Laba', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8.3 (2019), 1–20.

²⁵ Gusti Ayu Catur Nur Sari, Gede Adi Yuniarta, and Made Arie Wahyuni, 'Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Environmental Disclosure', *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 9.3 (2018), 145–55
<<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/16959/10156%0Ahttp://dx.doi.org/10.23887/jimat.v9i3.20450>>.

²⁶ I Komang, 'Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Pada Nilai Perusahaan', *E-Jurnalakuntansi Universitas Udayana*, 9.3 (2014), 575–90
<<https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Akuntansi/Article/View/9317>>.

perusahaan.²⁷ Kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

Kepemilikan Manajerial

$$= \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Pihak Manajemen}}{\text{Jumlah Saham yang beredar}} \times 100\%$$

b. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan orang yang utama menjalankan sistem tata kelola yang ada didalam perusahaan serta mengawasi.²⁸ Dewan Komisaris turut mengawasi dan memberikan pengarahan tentang kebijakan Direksi dan hal umum yang berkaitan dengan perusahaan dan kegiatan usahanya, serta memberikan nasihat kepada Direksi jika dibutuhkan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Dewan Komisaris bertindak sepenuhnya untuk kepentingan perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya. Kemampuan Dewan Komisaris guna memonitor adalah tugas yang positif dan independensi dari Dewan Komisaris eksternal. Dewan komisaris juga bertugas menjamin kualitas laporan yang ditampilkan.²⁹

Secara global dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab untuk mengawasi kualitas keterangan yang tercantum pada laporan *financial*. Hal ini sebab adanya kepentingan dari manajemen untuk melaksanakan manipulasi laporan yang berefek terhadap berkurangnya keyakinan investor. Guna mengatasi hal tersebut, dewan komisaris diperbolehkan memiliki akses terhadap informasi industry.³⁰

²⁷ Fioren Asitalia And I T A Trisnawati, 'Pengaruh Good Corporate Governance Dan Manajemen Laba', *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19.1 (2017).

²⁸ Aminar Sutra Dewi, Desfiana Sari, And Henryanto Abaharis, 'Kinerja Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek', 3.3 (2018), 445-54.

²⁹ Tri Kartika Pertiwi, Ferry Madi Ika Pratama, "Pengaruh Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Food And Beverage", *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 14, No. 2 (2012). Hlm. 121-122.

³⁰ Muhammad Fathorossi, Dwi Cahyono, Gardina Aulin Nuha, "Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba", *Journal of Business, Management and Accounting*, Vol. 2, No. 1 (2020). Hlm. 212.

Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris antara lain, yaitu:

1. Melaksanakan tugas sesuai *Good Corporate Governance*.
2. Mengawasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada tiap kegiatan operasional bank.
3. Mengawasi pelaksanaan tugas dan memberi nasehat kepada direksi, tapi dilarang ikut mengambil keputusan kegiatan operasional bank.
4. Memastikan direksi *follow up* temuan audit atau rekomendasi Bank Indonesia, auditor intern/ekstern maupun DPS.
5. Melapor kepada Bank Indonesia dalam waktu 7 hari kerja jika menemukan pelanggaran terhadap undang-undang perbankan atau jika ada kondisi yang membahayakan bank.
6. Demi efektifitas tugas, dewan komisaris membentuk komite pemantau resiko, komite remunerasi dan nominasi serta komite audit.
7. Komisaris harus membentuk pedoman tata tertib kerja komite tersebut diatas dan selalu mengupdatenya.
8. Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
9. Komisaris wajib membuat pedoman dan tata tertib kerja Dewan komisaris minimal tentang waktu kerja dan pengaturan rapat minimal dua bulan sekali.
10. Membuat laporan penerapan *Good Corporate Governance* kepada Bank Indonesia.³¹

Dewan Komisaris dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini:

Dewan Komisaris = Total anggota dewan komisaris suatu perusahaan

c. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan besarnya total saham yang dimiliki lembaga dari jumlah saham yang beredar. Terdapatnya kepemilikan institusional bisa mengawasi secara profesional perkembangan investasinya dengan hasil taraf pengendalian terhadap manajemen sangat

³¹ Nur Hisamuddin and M. Yayang Tirta K, 'Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah', *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10.2 (2015), 109 <<https://doi.org/10.19184/jauj.v10i2.1254>>.

tinggi yang pada ujungnya bisa mencegah kecurangan. Investor institusional antara lain meliputi industri asuransi, reksadana dan dana pensiun.³² Investor institusional diyakini dapat memanfaatkan keterangan keuntungan pada periode saat ini guna memperkirakan keuntungan di waktu yang akan datang daripada investor non institusional. Kepemilikan institusional bisa menaikkan nilai perusahaan, dengan menggunakan keterangan, dan bisa mencegah konflik keagenan sebab melalui bertambahnya kepemilikan institusional maka seluruh kegiatan industri akan diawasi oleh pihak lembaga.³³

Kepemilikan institusional mempunyai makna untuk mengawasi manajemen, sebab melalui kepemilikan institusional dapat memotivasi kemajuan monitoring yang lebih optimal. Proses pengawasan tersebut dapat menjamin bertambahnya kemakmuran pemilik modal. Signifikansi kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditegaskan dengan investasi yang cukup besar pada pasar modal. Semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh institusi menyebabkan pengawasan yang dilakukan lebih efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer. Maka kepemilikan institusional akan mendorong manajer untuk menunjukkan kinerja yang baik dihadapan para pemegang saham.³⁴ Investor institusional perusahaan publik diantaranya mencakup unit *trusts* dan *investment funds* yang diciptakan berbagai industri asuransi, dana pension, industri dana reksa, industri asuransi, dan mutual trusts.³⁵

Kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan kepada manajemen agar operasional perusahaan yang lebih optimal. Hal tersebut

³² Titah Kinanti Kusumaningtyas, ‘Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Pada Indeks Sri-Kehati’, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4.7 (2015), 1–15.

³³ Ni Putu Wida, ‘Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Return on Asset’, *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5.5 (2016), 3163–90.

³⁴ Intan Candradewi, Ida Bagus Panji Sedana, ‘Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Return On Asset’, *Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No. 5 (2016). Hlm. 3170.

³⁵ Haposan Banjarnahor, Agus Defri Yando, ‘Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderisasi’, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, Vol. 2, No.1 (2018). Hlm. 31.

dikarenakan investor institusional berperan dalam penentuan kebijakan yang strategis supaya tidak mudah percaya terhadap perilaku pemalsuan keuntungan. Monitoring itu pastinya akan menjamin kesejahteraan guna pemilik modal, dampak kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.³⁶ Dengan adanya kepunyaan oleh investor institusional dapat menaikkan monitoring yang lebih efektif terhadap kinerja manajemen, sebab kepunyaan saham mewakili sebuah sumber kekuasaan yang bisa dipakai guna mendukung atau sebaliknya terhadap suatu kinerja manajemen.³⁷

Kepemilikan institusional mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya:

- a. Mempunyai profesionalisme dalam menganalisa keterangan yang bisa membuktikan kehandalan informasi.
- b. Mempunyai dorongan yang erat guna menjalankan monitoring lebih ketat atas kegiatan yang terjadi pada industri.³⁸

Kepemilikan Institusional dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini:

Kepemilikan Institusional

$$= \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Investor (Institusi)}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

d. Komite Audit

Komite Audit dapat didefinisikan dengan komite yang diwujudkan oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Fungsi utama Komite Audit yaitu membantu

³⁶ I Putu Adhi, 'Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Hubungan Antara Kinerja Dengan Nilai Perusahaan', *E-Jurnal Akuntansi*, 5.3 (2013), 639–51.

³⁷ Novy Sulistyoningih, Nur Fadjrih Asyik, "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Manajemen Laba", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 8, No. 3, (2019). Hlm. 4.

³⁸ Neni Marlinai, 'Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2012)', 3.2000 (2014), 1–14.

Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap tahapan penyampaian laporan keuangan, audit, manajemen risiko dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, Komite Audit berpedoman kepada Piagam (*Charter*) Komite Audit yang mengacu kepada peraturan OJK yang berlaku dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan tugasnya, keahlian akuntansi dan keuangan dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari komite audit yaitu membantu auditor dalam menjaga kualitas laporan keuangan perusahaan. Komite Audit dengan anggota yang mempunyai keahlian di bidang akuntansi serta keuangan diharapkan akan menjadi lebih efektif.³⁹

Komite Audit merupakan suatu media yang dapat menjadi sarana untuk peningkatan efektivitas sistem kontrol pada suatu perusahaan termasuk pelaporan keuangan. Salah satu tugas komite audit yakni membantu pekerjaan dewan komisaris guna menambah kualitas pelaporan keuangan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir tingkat risiko yang diperoleh suatu perusahaan terkait dengan kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.⁴⁰

Komite audit memiliki tugas yang strategis dalam aspek menjaga kredibilitas mekanisme penyusunan laporan *financial* yang memadai dan menilai pelaksanaan *good corporate governance* diperusahaan. Komite audit dibentuk untuk memeriksa pertanggungjawaban keuangan direksi perusahaan kepada para pemilik modal. Diharapkan dengan pelaksanaan audit ini, dapat mengurangi perilaku *opportunistic* para manajer.⁴¹ Komite Audit merupakan komite yang diciptakan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melakukan tugas

³⁹ Ignasia Nathania, 'Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Instusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011 – 2013', *Journal Of Accounting*, 2.2 (2016).

⁴⁰ Suzy Noviyanti Fitriyani, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas, Dan Independensi Komite Audit Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Bei', *Journal of Economic, Business and Accounting*, 5 (2021).

⁴¹ Natasha Suri, Intan Pramesti Dewi, "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food And Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2016)", *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, Vol. X, No. 2 (2018). Hlm. 73.

dan peran Dewan Komisaris.⁴² Komite audit merupakan bagian tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan GCG. Hal ini disebabkan karena pengawasan dan akuntabilitas dewan komisaris belum memadai.⁴³

Komite Audit berperan untuk mempertemukan kaitan antara auditor eksternal dengan industry dan juga dewan komisaris auditor internal.⁴⁴ Komite audit berperan membantu dewan komisaris guna membuktikan apabila:

- a. Laporan *financial* ditampilkan secara wajar relevan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Struktur pengendalian internal industri dilakukan dengan baik.
- c. Implementasi audit internal maupun eksternal dilakukan relevan dengan standar audit yang berlaku.
- d. Tindak lanjut temuan hasil audit dilakukan oleh manajemen.⁴⁵

Komite Audit dapat diukur dengan persamaan berikut:

Komite Audit = Total anggota komite audit yang dicantumkan pada laporan keuangan

3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah komponen dari mekanisme pelaporan keuangan. Laporan *financial* secara umum adalah tulisan

⁴² Yushita Marini And Others, ‘Pengaruh Good Corporate Governance’, *Jurnal Humaniora*, 2006, 7–20.

⁴³ Gusti Ayu Catur Nur Sari Et All, “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Environmental Disclosure (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Dan Sektor Perkebunan Yang Terdaftar Di BEI Dan Terdaftar Di PROPER Tahun 2013-2017)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 9, No. 3 (2018). Hlm. 147.

⁴⁴ N V Sondokan And Others, ‘Audit Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia Periode 2014-2017 The Influence Of The Independent Board Of Commissioners , The Board Of Directors , And The Audit Board On The Value Of Companies Listed In The Indonesian Stock Exchang’, *Jurnal Emba*, 7.4 (2019), 5821–30.

⁴⁵ Noor Mita Dewi, Fakultas Ekonomi, and Universitas Muhammadiyah Semarang, ‘Pengaruh Kepemilikan Institusional , Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode’, *Maksimum: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9.1 (2019), 40–51.

informasi *financial* sebuah industri dalam periode akuntansi tertentu yang bisa dimanfaatkan guna mendeskripsikan kinerja keuangan tersebut. Laporan keuangan sangat bermanfaat guna pengambilan keputusan jadi apabila laporan keuangan tersebut andal dan relevan yang berarti tersedia saat dibutuhkan dan bisa diuji kebenarannya. Seorang Akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan, bahkan harus dapat menganalisis serta mengintrepretasikan laporan keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan dapat diartikan sebagai hasil dari mekanisme akuntansi yang dapat dipakai sebagai media untuk mengkomunikasikan antara data keuangan perusahaan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan yang mengkomunikasikan informasi keuangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan bisa dipakai sebagai bahan pemikiran untuk menentukan kebijakan ekonomi, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan.⁴⁶

Laporan keuangan ialah satu dari berbagai sumber informasi yang penting bagi para pengguna laporan *financial* dalam rangka mengambil kebijakan ekonomi. Laporan keuangan ini akan menjadi lebih bermanfaat apabila keterangan yang terdapat pada laporan *financial* itu dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang.⁴⁷ Tujuan umum dari laporan *financial* yakni untuk memberikan keterangan mengenai hasil operasi, kedudukan keuangan, dan arus kas organisasi. Informasi ini digunakan oleh para pembaca laporan keuangan untuk membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya.⁴⁸ Tujuan dari penyusunan laporan keuangan ialah sebagai sarana keterangan mengenai kedudukan keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang berguna untuk mayoritas penggunaannya dalam pengambilan kebijakan ekonomis.⁴⁹

⁴⁶ Rezha Risqurrahman and others, 'Pengaruh Audit Tenure, Mekanisme Corporate Governance, Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018) The Effect Of Audit Tenure, Corporate Governance Mechanis, And Audit Quality On The Integrity Of Financial Statement (An Empirical Study of Mining Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2014-2018)', 7.2 (2020), 2731–42.

⁴⁷ Alexander Thian, "Analisis Laporan Keuangan", 2022.

⁴⁸ Darmawan, "Dasar-Dasar Memahami Rasio Dan Laporan Keuangan", 2020.

⁴⁹ Maratur Roiyah, 'Pengaruh Profitabilitas , Ukuran Perusahaan Dan Good', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2014, 1–18.

Sejalan dengan tujuan penyajian laporan keuangan dimana bermaksud guna memberikan keterangan keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Kegunaan laporan keuangan akan dikategorikan berdasarkan pihak pengguna informasi keuangan perusahaan yaitu pihak internal dan eksternal perusahaan. Adapun pihak-pihak pengguna laporan keuangan diantaranya adalah:

1. Pihak internal
 - a. Manajemen perusahaan
Manajemen menggunakan laporan keuangan untuk mengukur kinerja perusahaan dan media analisis sebelum pengambilan keputusan terkait operasional perusahaan dan sebagai dasar evaluasi untuk perencanaan ke depan.
 - b. Karyawan
Karyawan menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan dan akuntabilitas perusahaan.
2. Pihak eksternal
 - a. Pemilik
Pemilik menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan perusahaan dan mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan dan sumber daya yang sudah diberikan kepada perusahaan.
 - b. Investor
Investor menggunakan laporan keuangan untuk melihat apakah suatu perusahaan memiliki prospek yang menjanjikan di masa mendatang dan akan dipertimbangkan sebagai salah satu komponen dalam portofolionya.
 - c. Kreditor
Bagi kreditor, laporan keuangan perusahaan berguna untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya.
 - d. Pemerintah
Pemerintah memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan dalam hal penentuan besaran kewajiban perusahaan untuk membayar pajaknya kepada negara.⁵⁰

Terdapat beberapa karakteristik utama laporan keuangan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

1. Informasi itu harus bermanfaat dan dipahami.
2. Informasi harus relevan dengan pengambilan keputusan.

⁵⁰ Rosanna Purba et all, “Analisis Laporan Keuangan”, 2023.

3. Informasi yang disajikan harus handal dan dapat dipercaya.
4. Informasinya harus memiliki sifat daya banding.⁵¹

4. Kecurangan Laporan Keuangan

Fraud merupakan suatu perbuatan dan tindakan yang dilakukan secara sengaja, sadar dan mau untuk menyalahgunakan segala sesuatu yang dimiliki secara bersama, misalnya sumber daya perusahaan dan negara, demi kenikmatan pribadi dan kemudian menyajikan informasi yang salah untuk menutupi penyalahgunaan tersebut. *Fraud* tidak sama dengan kecacatan yang tidak disengaja (*unintentional error*). Apabila individu secara tidak sengaja menginput data yang salah saat menulis sebuah transaksi, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai *fraud* karena dilakukan dengan tidak sengaja. Tetapi jika seseorang dengan kecerdikannya, merekayasa laporan keuangan untuk menarik minat calon investor untuk berinvestasi pada perusahaannya maka disebut *fraud*. *Fraud* pada laporan *financial* ialah kesengajaan ataupun kelalaian dalam pelaporan keuangan dimana laporan keuangan yang ditampilkan tidak relevan dengan standar akuntansi yang berlaku. Kelalaian ini sifatnya material alhasil bisa mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh pihak yang berkepentingan.⁵²

Salah satu tindakan kecurangan yaitu management fraud. Kecurangan manajemen adalah kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan pada sebuah perusahaan. Laporan keuangan adalah alat yang digunakan untuk melihat kondisi suatu perusahaan. Dalam hal ini manajemen menginginkan agar para pemegang saham dan pengguna laporan keuangan lain mengetahui bahwa kinerja perusahaan terlihat baik. Bagi perusahaan dengan kinerja buruk namun ingin terlihat baik dihadapan para pemegang saham memilih untuk melakukan fraud atau kecurangan dalam pelaporan keuangan.⁵³

Menurut Hukum, *fraud* atau kecurangan/penipuan adalah tindakan yang sengaja dilakukan secara tidak adil dan merugikan pihak lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam dunia bisnis dijelaskan bahwa *fraud* atau

⁵¹ Wastam Wahyu Hidayat, "Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan", 2018.

⁵² Sekar Akrom Faradiza, "Fraud Pentagon Dan Kecurangan Laporan Keuangan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1, Hlm. 4.

⁵³ Chaidir Iswanaji, "Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish Ratio Index Pada Pabrik Cambric Yogyakarta", *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 8, No. 1 (2018). Hlm. 2.

kecurangan/penipuan memiliki makna atau arti yang lebih detail lagi, yaitu penipuan yang dilakukan dengan niat, penyalahgunaan/penyelewengan terhadap aset perusahaan, atau kecurangan data keuangan untuk keuntungan/kepentingan pelaku. Pada literatur akuntansi dijelaskan bahwa *fraud* atau kecurangan/penipuan disebutkan kejahatan tinggi (*white-collar crime*), penyalahgunaan terhadap kepercayaan, penggelapan, serta penyimpangan. Karena perbedaan pada implikasi *fraud* atau kecurangan/penipuan terhadap auditor, sehingga digolongkan menjadi 2 (dua) tingkatan yaitu, *fraud* yang dilakukan karyawan (*employee fraud*) dan *fraud* yang dilakukan manajemen (*management fraud*).⁵⁴

Kecurangan laporan keuangan yang diukur dengan *F-score* model. Model ini dikembangkan oleh Dechow pada tahun 2011, sehingga didapatkan penjabaran rumus sebagai berikut.⁵⁵

$$F\text{-score} = \text{Accrual Quality} + \text{Financial Performance}$$

Accrual Quality diprosikan dengan RSST accrual, sedangkan *financial performance* diprosikan dengan perubahan pada akun piutang, perubahan pada akun persediaan, perubahan pada akun penjualan tunai, dan perubahan pada laba (EBIT)

$$RSST\ Accrual = (\Delta WC + \Delta NCO + \Delta FIN) / ATS$$

Keterangan:

WC (*working capital*) = Aset Lancar – Liabilitas Lancar

NCO (*Noncurrent Operating Accrual*) = [Total Aset – Aset Lancar – Investasi dan Uang Muka] – [Total Liabilitas – Liabilitas Lancar – Utang Jangka Panjang]

FIN (*Financial Accrual*) = Total Investasi – Total Liabilitas

ATS (*Average Total Assets*) = [Persediaan Total Aset + Total aset akhir]/2

⁵⁴ Helda F Bawekes, Aaron Ma Simanjuntak, And Sylvia Christina Daat, 'Pengujiian Teori Fraud Pentagon Terhadap Fraudulent Financial Reporting (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)', *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13.1 (2018), 114–34.

⁵⁵ Laurena Julya, 'Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 4.1 (2019), 44–59 <<https://doi.org/10.31002/rak.v4i1.1381>>.

$$\text{Financial Performance} = \text{Perubahan Piutang} + \text{Perubahan Persediaan} + \text{Perubahan Penjualan} + \text{Perubahan Laba}$$

Keterangan:

Perubahan Piutang = Δ Piutang / Rata-rata Total Aset

Perubahan Persediaan = Δ Persediaan / Rata-rata Total Aset

Perubahan Penjualan = $[\Delta$ Penjualan / Penjualan (t)] – $[\Delta$ Piutang / Piutang(t)]

Perubahan Laba = $[\text{Laba (t) / Rata-rata Total Aset (t)}] - [\text{Laba (t - 1) / Rata - rata Total Aset (t - 1)}]$

5. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah indeks yang mengukur kinerja harga semua saham syariah yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah.⁵⁶ Seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam daftar efek syariah merupakan Indeks Saham Syariah Indonesia. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) diluncurkan pada 12 Mei 2011 oleh Bapepam-LK dan dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat DSN-MUI. Sejak itu, 331 saham telah dicatatkan di indeks tersebut.⁵⁷

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah memaparkan hubungan antara *good corporate governance* terhadap kecurangan laporan keuangan. Pada riset terdahulu terdapat hasil penelitian yang berbeda, dengan adanya perbedaaan hasil itu tentu membantu terkait pandangan yang akan dilaksanakan penelitian ini untuk mengkaji lebih jauh keterkaitannya dengan tema dan masalah yang ada pada penelitian. Dari beberapa peneliti telah melakukan penelitian dengan memiliki karakteristik penulisan yang baik dan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini antara lain, yaitu:

⁵⁶ Feren Anggun Pratitis and Taufiq Andre Setiyono, 'Komparasi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19', *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1.1 (2021), 68–79 <<https://doi.org/10.28918/jief.v1i1.3730>>.

⁵⁷ Rizky Aulia and Azhar Latief, 'Pengaruh Inflasi Dan BI Rate Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)', *Borneo Student Research*, 1.3 (2020), 2140–50 <<https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/download/872/585>>.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Mengenai Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Oetary Triyani, Kamalia, Azwir (2019)	Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kecurangan Laporan Keuangan dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Moderating	Dependen : kecurangan laporan keuangan Independen : komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dengan manajemen laba, komite audit dengan manajemen laba, kepemilikan manajerial dengan manajemen laba, kepemilikan institusional dengan manajemen laba, kepemilikan institusional dengan manajemen laba	Komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dengan manajemen laba, komite audit dengan manajemen laba, kepemilikan manajerial dengan manajemen laba, Kepemilikan Institusional dengan Manajemen Laba berpengaruh tidak signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan

<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan variabel dependen kecurangan laporan keuangan b. Menggunakan variabel independen komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pada penelitian yang dilakukan oleh Oetary Triyani, Kamalia, dan Azwir, variabel independennya meliputi komite audit, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dengan manajemen laba, kepemilikan institusional dengan manajemen laba, dan kepemilikan manajerial dengan manajemen laba. Sedangkan komite audit, dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini. 				
2	<p>Ni Kadek Yulik Tiapandewi, Ni Nyoman Ayu Suryandari, Putu Gede Bagus Arie Susandya (2020)</p>	<p>Dampak <i>Fraud Triangle</i> Dan Komite Audit Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan</p>	<p>Dependen : kecurangan laporan keuangan Independen : tekanan eksternal, target keuangan, <i>nature of industry</i>, <i>auditor change</i>, komite audit</p>	<p>Tekanan eksternal (LEV), target keuangan (ROA), <i>nature of industry</i> (RCV) tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Auditor change berdampak negatif terhadap kecurangan laporan keuangan dan komite audit (KA) berdampak</p>

				positif terhadap kecurangan laporan keuangan.
<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan variabel dependen kecurangan laporan keuangan b. Menggunakan variabel independen komite audit <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pada penelitian Ni Kadek Yulik Tiapandewi, Ni Nyoman Ayu Suryandari, Putu Gede Bagus Arie Susandya menggunakan variabel independen tekanan eksternal, target keuangan, <i>nature of industry</i>, <i>auditor change</i>, <i>komite audit</i>. Sedangkan pada riset ini menggunakan variabel independen kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris dan komite audit. 				
3	Tan, Novita Angelina, Anis Chariri (2022)	Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Aktivitas Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	<p>Dependen : kecurangan laporan keuangan</p> <p>Independen : proporsi dewan komisaris independen, aktivitas komite audit, dan kepemilikan manajerial.</p>	Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sementara, aktivitas komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan

				laporan keuangan
<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan variabel dependen kecurangan laporan keuangan b. Menggunakan variabel independen kepemilikan manajerial <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pada penelitian Tan, Novita Angelina dan Anis Chariri menggunakan variabel independen proporsi dewan komisaris independen, aktivitas komite audi. Sedangkan pada riset ini menggunakan variabel independen kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan dewan komisaris. 				
4	Syafitri, Ermaya, Putra (2021)	Dampak <i>Corporate Governance, Financial Stability</i> , Dan <i>Financial Target</i> Dalam Kecurangan Laporan Keuangan	<p>Dependen : kecurangan laporan keuangan</p> <p>Independen : Dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, <i>financial stability</i>, dan <i>financial target</i></p>	Dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, <i>financial target</i> , serta variabel kontrol berbentuk <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Adapun <i>financial stability</i> berpengaruh signifikan

				positif terhadap kecurangan laporan keuangan.
<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan variabel dependen kecurangan laporan keuangan b. Menggunakan variabel independen kepemilikan manajerial <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pada penelitian Syafitri, Ermaya, Putra menggunakan variabel independent <i>financial stability</i>, komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris dan <i>financial target</i> serta kepemilikan manajerial. Sedangkan pada riset ini tidak menggunakan variabel independen <i>financial stability</i>, dan <i>financial target</i>. 				
5	Oktaviani Kristina Kardhianti dan Ceacilia Srimindarti (2022)	Pengaruh Manajemen Laba Dan <i>Good Corporate Governanc e</i> Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	<p>Dependen : kecurangan laporan keuangan</p> <p>Independen : manajemen laba, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit.</p>	Manajemen laba berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kecurangan laporan keuangan. Sementara, Kepemilikan manajerial, komite audit dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

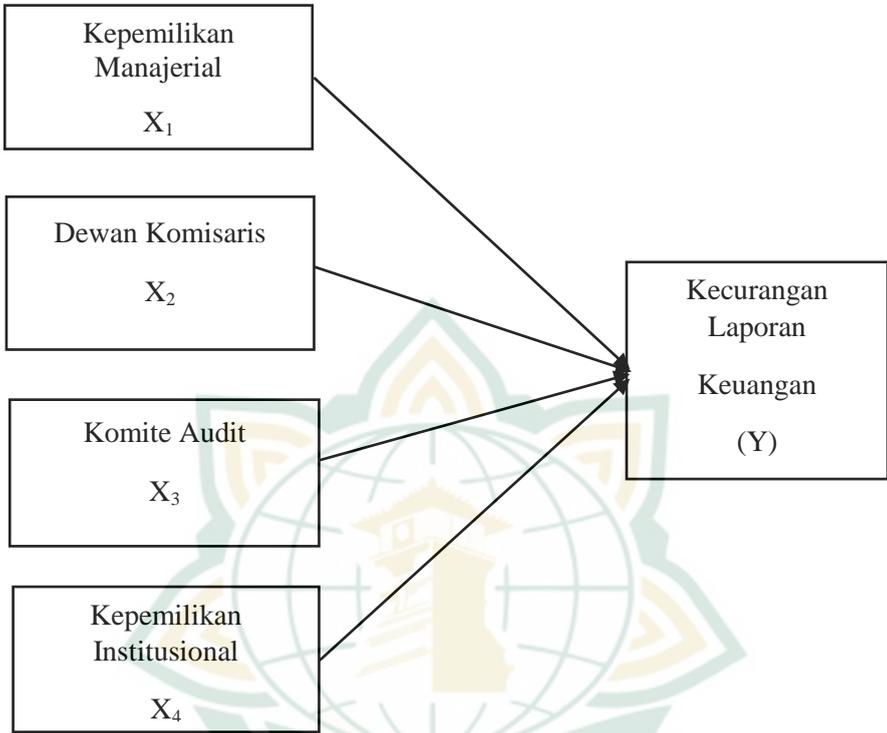
<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan variabel dependen kecurangan laporan keuangan b. Menggunakan variabel independen dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan manajerial. <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pada penelitian Oktaviani Kristina Kardhianti dan Ceacilia Srimindarti menggunakan variabel independen manajemen laba, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit. Disamping itu dalam riset ini tidak memakai variabel independen manajemen laba. 				
6	<p>Alam Ashari Kurniawan et all. (2020)</p>	<p>Pengaruh Manajemen Laba Dan <i>Corporate Governanc e</i> Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan</p>	<p>Dependen : kecurangan laporan keuangan Independen : manajemen laba, kepemilikan manajerial, kepemilikan Institusional, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit</p>	<p>Manajemen laba, dewan komisaris independen, kepemilikan Institusional, dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan komite audit tidak berpengaruh pada kecurangan laporan keuangan</p>
<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan variabel dependen kecurangan laporan keuangan b. Memakai variabel independent komite audit, kepemilikan Institusional, dewan komisaris dan kepemilikan manajerial <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pada penelitian Alam Ashari Kurniawan dkk. menggunakan komite audit, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, 				

dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan manajemen laba sebagai variabel independen dalam penelitiannya. Selain itu komite audit, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan kepemilikan institusional digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini.

C. Kerangka Berfikir Penelitian

Penelitian ini mencoba mengetahui hubungan *good corporate governance* terhadap kecurangan laporan keuangan pada Perusahaan Manufaktur sub sector makanan dan minuman yang tercatat di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Hubungan antar variabel kerangka pemikiran bisa digambarkan sebagai berikut:





D. Hipotesis

1. Hipotesis antara kepemilikan manajerial terhadap kecurangan laporan keuangan

Kepemilikan manajerial adalah yang memiliki industri sekaligus pengelola industri. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial maka semakin sedikit potensi adanya konflik, sebab apabila pemilik berperan sebagai pengelolaa industri maka untuk penentuan kebijakan hendaknya sangat hati-hati supaya tidak merugikan industri. Jika kepemilikan manajerial sedikit maka sedikit juga pemilik modal yang ikut serta pada pengelolaan industry, maka semakin tinggi masalah keagenan disebabkan ketidakterupaan kepentingan yang semakin meningkat.⁵⁸ Total kepemilikan saham manajerial pada industri dapat menambah tanggung jawab manajer terhadap kinerja mereka, sebab melalui

⁵⁸ Intan Candradewi, Ida Bagus Panji Sedana, “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Return On Asset”, *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No. 5 (2016). Hlm. 3172-3173.

kebijakan dan kinerja manager itu dapat mempengaruhi taraf keuntungan dan risiko yang akan ditanggung secara individu. Sehingga hal tersebut mampu mengurangi masalah keagenan yang terjadi dalam perusahaan dengan adanya kepemilikan manajer terhadap jumlah saham pada perusahaan.⁵⁹

Dalam riset lain yang dijalankan Andrian Budi Prasetyo (2014) bahwa kepemilikan manajerial berdampak positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan.⁶⁰ Kajian yang dilakukan oleh Tasya Luthfiana Yusup, et all. (2021) juga membuktikan kepemilikan manajerial berdampak terhadap manipulasi laporan keuangan.⁶¹ Riset yang dijalankan oleh Fitri Ismiyanti dan Chintia Prastichia (2015) menunjukkan kepemilikan manajerial berdampak negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.⁶² Adapun pada riset lain yang dijalankan Oktaviani Kristina Kardhianti dan Ceacilia Srimindarti (2022) menjelaskan jika kepemilikan manajerial tidak berdampak terhadap kecurangan laporan keuangan. Artinya, mengindikasikan bahwa sebanyak apapun saham yang dimiliki oleh manajerial tidak bisa mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan.⁶³

H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan

2. Hipotesis antara dewan komisaris terhadap kecurangan laporan keuangan

Dewan komisaris berperan melaksanakan monitoring dan memberikan saran kepada dewan direksi industri. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas langsung terhadap industri, peran pokok

⁵⁹ Tegar Rahardi, Andri Prastiwi, “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2012)”, *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 1, No. 1 (2012). Hlm. 4.

⁶⁰ Andrian Budi Prasetyo, “Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Listed di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010)”, *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol. 11, No. 1 (2014).

⁶¹ Tasya Luthfiana Yusup, et all, “Pengaruh Independensi Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kecurangan Laporan Keuangan”, *Prosiding Akuntansi*, Vol. 7, No. 1 (2021).

⁶² Fitri Ismiyanti dan Chintia Prastichia, “Mekanisme Corporate Governance Dan Kecurangan Laporan Keuangan”, *DeReMa Jurnal Manajemen*, Vol. 10, No. 2 (2015).

⁶³ Oktaviani Kristina Kardhianti, Ceacilia Srimindarti, “Pengaruh Manajemen Laba Dan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 4, No. 3 (2022).

dari dewan komisaris yaitu memonitoring kelengkapan dan kualitas keterangan laporan atas kinerja dewan direksi. Sebab itu, kedudukan dewan komisaris sangat penting dalam mempertemukan kepentingan principal dalam suatu industri.⁶⁴ Dewan komisaris yang berukuran kecil akan lebih optimal untuk menjalankan perilaku monitoring daripada dewan komisaris besar. Sebab diyakini kurang efektif untuk melaksanakan perannya karena sulit dalam berkomunikasi, koordinasi, dan penentuan kebijakan.⁶⁵

Penelitian yang dilakukan Pratiwi Nila Sari dan Cahyadi Husadha (2020) yang menyatakan jika dewan komisaris mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) dalam pelaporan keuangan.⁶⁶ Fitri Ismiyanti dan Chintia Prastichia (2015) juga menjelaskan jika jumlah dewan komisaris berdampak positif terhadap kecurangan laporan keuangan.⁶⁷ Riset Salim (2017) menyatakan apabila dewan komisaris berdampak negatif terhadap kelalaian laporan keuangan.⁶⁸ Sedangkan dalam penelitian lain dengan hasil yang berbeda dilakukan Alam Ashari Kurniawan et al. (2020) menunjukkan jika dewan komisaris tidak berdampak terhadap laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan jika seberapa banyak total dewan komisaris di industri tidak secara efektif dapat melakukan pengawasan terhadap dewan direksi dan belum mampu meningkatkan kinerja manajemen sehingga belum bisa untuk mengurangi masalah kecurangan laporan.⁶⁹

⁶⁴ Panky Pradana Sukandar, Rahardja, "Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Dan Dewan Komisaris Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan", *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 3, No. 3 (2014). Hlm. 2.

⁶⁵ Shierly Pricilia, dan Liana Susanto, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014", *Jurnal Ekonomi*, Vol. XXII, No. 02 (2017). Hlm. 273.

⁶⁶ Pratiwi Nila Sari dan Cahyadi Husadha, "Pengungkapan Corporate Governance Terhadap Indikasi Fraud Dalam Pelaporan Keuangan", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM)*, Vol. 16, No. 1 (2020).

⁶⁷ Fitri Ismiyanti dan Chintia Prastichia, "Mekanisme Corporate Governance Dan Kecurangan Laporan Keuangan", *DeReMa Jurnal Manajemen*, Vol. 10, No. 2 (2015).

⁶⁸ Salim, "Pengaruh Manajemen Laba dan Corporate Governance terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2015)", (2017).

⁶⁹ Alam Ashari Kurniawan, Linda Y. Hutadjulu, Aaron M. A. Simanjuntak, "Pengaruh Manajemen Laba Dan Corporate Governance Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan", *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, Vol. 15, No. 1 (2020).

H2 : Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan

3. Hipotesis antara komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan

Komite audit adalah salah satu bagian *corporate governance* yang berperan penting pada tahap pelaporan keuangan dengan cara memonitoring pekerjaan auditor independen dalam tahap pelaporan *financial* serta membantu tugas-tugas dari dewan komisaris.⁷⁰ Komite Audit diciptakan oleh Dewan Komisaris, yang bekerja berfungsi guna membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugasnya. Komite Audit bersifat independen baik dalam melakukan perannya ataupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Audit adalah pihak yang menjadi penghubung antara pihak eksternal auditor dan manajemen perusahaan sehingga Komite Audit dituntut harus independen dalam menjalankan tugasnya tersebut.⁷¹

Ni Kadek Yulik Tiapandewi, et all. (2020) juga membuktikan jika komite audit (KA) berdampak positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini bermakna komite audit pada industry dapat menjadi salah satu upaya dan meminimalkan tindakan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan maka semakin banyak komite audit dalam industri dapat menurunkan tingkat kecurangan dalam laporan keuangan.⁷² Penelitian yang dilakukan Fitriyani dan Suzy Noviyanti (2021) menunjukkan jika komite audit berdampak signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan.⁷³ Penelitian Mardani, et all. (2020) juga menunjukkan bahwa komite audit berdampak signifikan terhadap pengungkapan

⁷⁰ Ni Made Adhika Verawati, Made Gede Wirakusuma, “Pengaruh Pergantian Auditor, Reputasi KAP, Opini Audit Dan Komite Audit Pada Audit Delay”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 17. 2 (2016). Hlm. 1093.

⁷¹ Eka Lestari, Murtanto, “Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris Dan Komite Audit, Struktur Kepemilikan, Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba”, *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, Vol. 17, No. 2 (2017). Hlm. 100.

⁷² Ni Kadek Yulik Tiapandewi, Ni Nyoman Ayu Suryandari, A. A. Putu Gede Bagus Arie Susandya, “Dampak Fraud Triangle Dan Komite Audit Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan”, *Jurnal Kharisma*, Vol. 2, No. 2 (2020).

⁷³ Fitriyani dan Suzy Noviyanti, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas, Dan Independensi Komite Audit Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan BEI”, *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*, Vol. 5, No. 1 (2021).

kecurangan laporan keuangan.⁷⁴ Sedangkan dalam riset lainnya dengan hasil yang berbeda dijalankan oleh Syafitri, Ermaya, Putra (2021) menunjukkan komite audit tidak berdampak signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.⁷⁵

H3 : Ukuran komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan

4. Hipotesis antara kepemilikan institusional terhadap kecurangan laporan keuangan

Organisasi yang memiliki kepentingan besar dalam investasi, khususnya investasi saham, dikenal sebagai kepemilikan institusional. Akibatnya, organisasi biasanya menugaskan departemen tertentu untuk mengawasi investasi bisnis. Kehadiran badan pengawas pengembangan investasi yang profesional mengakibatkan tingginya kendali atas perilaku pengelolaan, sehingga dapat membatasi potensi.⁷⁶ Pemantauan yang efektif oleh kepemilikan institusional dapat membantu mengendalikan manajemen dan mengurangi kasus penipuan laporan keuangan.⁷⁷

Riset yang dijalankan oleh Mirza Afanin Riandani dan Evi Rahmawati (2019) menyatakan jika kepemilikan institusional mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.⁷⁸ Riset Bowo Sumanto, et all. (2014) membuktikan jika kepemilikan institusional berdampak signifikan

⁷⁴ Mardani, Yesi Mutia Basri, M Rasuli, “Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI 2018”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 1 (2020).

⁷⁵ M.Syafitri, H.N.L Ermaya, A.M Putra, “Dampak Corporate Governance, Financial Stability, Dan Financial Target Dalam Kecurangan Laporan Keuangan”, *Jurnal Akunida*, Vol. 7, No. 1 (2021).

⁷⁶ Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, Kharis Raharjo, “Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) Dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013”, *Journal Of Accounting*, Vol. 2, No.2 (2016).

⁷⁷ Felicia Marsha, Imam Ghozali, “Pengaruh Ukuran Komite Audit, Audit Eksternal, Jumlah Rapat Komite Audit, Jumlah Rapat Dewan Komisaris Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba”, *Diponegoro Journal Of Economics*, Vol. 6, No. 2 (2017). Hlm. 4.

⁷⁸ Mirza Afanin Riandani dan Evi Rahmawati, “Pengaruh Fraud Pentagon Kepemilikan Institusional dan Asimetris Informasi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 20152017)”, *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 3 No. 2 (2019).

terhadap kelalaian laporan keuangan.⁷⁹ Oetary Triyani, Kamalia, Azwir (2019) juga membuktikan bahwa kepemilikan institusional berdampak tidak signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.⁸⁰ Sedangkan dalam riset lainnya dengan hasil yang berbeda dijalankan oleh Syafitri, Ermaya, Putra (2021) menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.⁸¹

H4 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.



⁷⁹ Bowo Sumanto et all, “Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba”, *Accounting Analysis Journal* 3, (1) (2014).

⁸⁰ Oetary Triyani, Kamalia, Azwir, “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kecurangan Laporan Keuangan dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Moderating”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 27, No. 1 (2019).

⁸¹ M.Syafitri, H.N.L Ermaya, A.M Putra, “Dampak Corporate Governance, Financial Stability, Dan Financial Target Dalam Kecurangan Laporan Keuangan”, *Jurnal Akunida*, Vol. 7, No. 1 (2021).